

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki rentang waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun..

Dokumen-dokumen perencanaan daerah tersebut selanjutnya dijadikan pedoman bagi arah pelaksanaan kegiatan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) dengan kurun waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Renja OPD sangat terkait dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD. Dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah maupun upaya bersama dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah, karena menjadi produk perencanaan pada unit satuan kerja pemerintah yang berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat. Kualitas

penyusunan Renja OPD sangat menentukan kualitas pelayanan pada publik yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor : 73 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana yang meliputi :

- a. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- b. Kedaruratan dan Logistik; dan
- c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien.
- .b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1.2 Landasan hukum

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265) ;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang – undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Regional.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;Sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 .
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian , dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Perubahan Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Renca Kerja Pemerintah Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah .
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2022.
20. Kepmendagri 050 -3708 Tahun 2021 Pemptakhiran Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah .
21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
24. Peraturan Bupati Balangan Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD.

1.3 Maksud dan Tujuan

a Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan tahun 2022 :

- 1) Menjabarkan arahan umum Rencana strategis tahun 2019 – 2024 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2022;
- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
- 4) Memberikan arah dan sekaligus tolak ukur keberhasilan kegiatan.

b Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan tahun 2023 :

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan;
- 2) Terciptanya kepastian dan sinergisitas dan sinergitas perencanaan program kegiatan penanggulangan bencana
- 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD

- 3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah:

1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA :

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN:

- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran;
- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH: :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun Anggaran 2021, BPBD Kabupaten Balangan mengelola anggaran belanja program kegiatan sebesar Rp. **7,719,795,480,-** (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2,643,538,758,- (Dua Milyar Enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dan Belanja Langsung Rp. 4.576.256.722,- (Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembiayaan 3 (tiga) program dengan 12 (dua belas) kegiatan. Realisasi anggaran belanja langsung terealisasi sebesar 86 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.931.548.369,- (Tiga Milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan)



TABEL TC 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)* Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : ... Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan-Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
1	05	01													
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kelancaran pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%					
1	05	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran, laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	30 Dokumen	0	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	10 Dokumen	33%	
1	05	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Dokumen	0	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	10 Dokumen	33%
1	05	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tingkat kelancaran pelayanan Administrasi perangkat daerah	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	05	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	84 Bulan	0	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	28 Bulan	33%
1	05	01	2	01	05	Kordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	6 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	33%

1	05	01	2	01	07	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/semester	Jumlah laporan keuangan bulanan atau semesteran	12 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	33%
1	05	01	2	05		Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Presentase sumber daya aparatur yang mendapat peningkatan disiplin dan kapasitas	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	276 stel	0	46 stel	46 stel	100%	46 stel	92 Stel	33%
1	05	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang undangan	40 Orang	0	40 Orang	40 Orang	100%	0	40 Orang	100%
1	05	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangn	120 Orang	0	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	40 Orang	33%
1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	TINGKAT KELANCARAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang diadakan	72 Bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Bulan	33%
1	05	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Buah	0	5 Buah	5 Buah	100%	5 Buah	10 Buah	33%
1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	72 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Buah	33%
1	05	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	72bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Buah	33%
1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat dan Kordinasi Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	540 Kali	0	90 Kali	90 Kali	100%	90 Kali	180 Kali	33%

1	05	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang / aset yang diadakan	6 Unit	0	2 unit	2 unit	100%		2 Unit	33%	
1	05	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang diadakan	6 Unit	0	2 unit	2 unit	100%	0	2 Unit	0
1	05	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	0	0	0	0	0	0	0
1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat	72 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Bulan	33%
1	05	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Bulan	33%
1	05	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	6 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	33%
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tingkat pelayanan jasa perkantoran	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang mendapat pemeliharaan rutin atau berkala dan perijinan kendaraan dinas atau operasional	72 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Bulan	33%
1	05	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	72 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Bulan	33%
1	05	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin atau berkala	0	0	-	-	-	12 bulan	12 Bulan	0
1	05	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor	72 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Bulan	33%

1	05	03	2	02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Anggota TRC	12 kegiatan	0	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	4 Kegiatan	17%
1	05	03	2	03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	90 paket	0	40 Paket	30 Paket	75%		30 Paket	33%
1	05	03	2	03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan logistik yang tersalurkan kepada korban bencana	390 paket	0	40 Paket	30 Paket	75%	50 paket	80 Paket	20%
1	05	04				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Prosentase Desa Siaga Bencana	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	04	2	01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	75 Kegiatan	0	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%	15 Kegiatan	25 Kegiatan	33%
1	05	04	2	01	02	Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan dan pelatihan tentang penanganan bencana kebakaran	75Kegiatan	0	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%	15 Kegiatan	25 Kegiatan	33%
1	05	04	2	04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tersedianya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1200 Orang	0	200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	400 Orang	33%

1	05	04	2	04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Bencana Kebakaran yang Tertangani	200 Orang	0	200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	400 Orang	33%
---	----	----	---	----	----	--	--	-----------	---	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----



2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Indikator Kinerja utama (IKU) terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD
Kabupaten Balangan

NO	Indikator	SPM	IKK	HGPK / Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan		14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	
5.	Kordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
6.	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/semester		Jumlah laporan keuangan bulanan atau semesteran		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
Kegiatan Administrasi Kepasawalan Perangkat Daerah													
7.	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakalan dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		46 Stel	46 Stel	46 Stel	46 Stel	46 Stel	46 Stel	46 Stel	60 Stel	
8.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang undangan		40 Peserta	40 Peserta	40 Peserta	40 Peserta	20 Peserta	40 Peserta	40 Peserta	40 Peserta	
9.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan		Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	60 Orang	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah													

22	Pemeriharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	3 Unit	1 Unit	1 Unit	
21	Pemeriharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
Program Penanggulangan Bencana											
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota											
23	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah wilayah berpotensi bencana yang terpantau	20 Desa	40 Desa	60 Desa	80 Desa	5 Desa	40 Desa	60 Desa	80 Desa	
24	Sosialisai,Komunikasi,Informasi,Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah Wilayah Berpotensi Bencana yang Mendapatkan Informasi tentang rawan bencana	20 Desa	40 Desa	60 Desa	80 Desa	20 Desa	40 Desa	60 Desa	80 Desa	
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											
25	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket dan 2 Kegiatan, 30 Peralatan dan 25 Peralatan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
26	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
27	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	86.634 Meter	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
28	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Anggota TRC	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
29	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan			100 orang	150 orang			100 orang	150 orang	

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kabupaten Balangan memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, faktor Sosial dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Balangan telah di desain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Kejadian bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya. Hal ini berdampak lanjut menjadi potensi penghambat laju pembangunan Kabupaten Balangan yang telah menjadi agenda maupun prioritas para pemangku kepentingan (Stake Holder). Sehingga distorsi-distorsi pembangunan semacam itu perlu dicegah dan di antisipasi sedini mungkin, jikalau penanganan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanganan penanggulangan bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen Pengurangan Resiko Bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sedangkan beberapa hal yang menjadi kelemahan dan ancaman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan antara lain:

- Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Kementerian/Instansi selain Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia;
- Adanya keterbatasan sarana komunikasi di kecamatan dan desa sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke Kabupaten;

- Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan Kebencanaan.

Namun demikian kondisi ekonomi diwilayah Kabupaten Balangan 2021-2026 yang diperkirakan akan cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan komitmen pemerintahan daerah dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Balangan yang Tangguh menghadapi bencana, BPBD Kabupaten Balangan terus berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya.

2.3. REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Renja Perangkat Daerah yang merupakan penguangan dari Renstra Perangkat Daerah atau sebagai turunan dari RKPD yang merupakan penguangan dari RPJMD Kabupaten, adalah sebuah runtutan proses atau alur mekanisme perencanaan yang harus disusun sebagai sebuah Dokumen Perencanaan. Berdasarkan uraian tersebut, berarti rancangan awal RKPD sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam RPJMD Kabupaten. Adapun secara keseluruhan kebutuhan anggaran untuk Belanja tahun 2023 menurut rancangan awal RKPD adalah Rp. 12.900.129.553,- (Dua Belas Milyar sembilan Ratus Juta seratus dua Puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tiga Rupiah). Sedangkan menurut hasil analisis kebutuhan adalah sebesar Rp. 10.952.380.533,- (Sepuluh Milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) termasuk belanja gaji dan tunjangan PNS.

Bila ditotal berdasarkan berdasarkan Program / Kegiatan Rencana Awal Renja 2023, maka Usulan Pagu Anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp. Rp. 6.892.860.703,- (Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga Rupiah), Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 4.893.704.050,- (Empat Milyar Delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu lima puluh Rupiah) dan Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp. 1.113.564.800,- (Satu Milyar Seratus tiga belas juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

Untuk melihat perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	BPBD Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 Dokumen	21.339.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	BPBD Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 Dokumen	21.339.600			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	BPBD Balangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	BPBD Balangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	118.480.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	118.480.000			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Balangan	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	4,418,570,155	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Balangan	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	3,761,783,085			
Kordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	BPBD Balangan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	10,000,000	Kordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	BPBD Balangan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	10,000,000			

	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/semester	BPBD Balangan	Jumlah laporan keuangan bulanan atau semesteran	2 Dokumen	46,800,000	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/semester	BPBD Balangan	Jumlah laporan keuangan bulanan atau semesteran	2 Dokumen	46,800,000	
Administrasi Kepagawalan Perangkat Daerah						Administrasi Kepagawalan Perangkat Daerah					
	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD Balangan	Jumlah pakalan dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	46 Stel	45,000,000	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD Balangan	Jumlah pakalan dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	46 Stel	45,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	BPBD Balangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	272,378,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	BPBD Balangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	272,378,000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Balangan	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang diadakan	12 Bulan	13,275,100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Balangan	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang diadakan	12 Bulan	13,275,100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD Balangan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Buah	222,978,900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD Balangan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Buah	256,172,900	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	BPBD Balangan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan		44,045,300	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	BPBD Balangan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		12 Bulan
	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	BPBD Balangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	11,995,200	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	BPBD Balangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	11,995,200	

Penyelenggaraan Rapat dan Kordinasi Konsultasi SKPD	BPBD Balangan	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	90 Kali	194,508,600	Penyelenggaraan Rapat dan Kordinasi Konsultasi SKPD	BPBD Balangan	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	90 Kali	172,604,000	
Kegiatan Pngadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan Pngadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD Balangan	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang diadakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD Balangan	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang diadakan			
Pengandaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD Balangan	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	424,845,300	Pengandaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD Balangan	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	213,821,500	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD Balangan	waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	193,383,600	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD Balangan	waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	193,383,600	
Penyediaan Jasa Konunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD Balangan	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	125,795,000	Penyediaan Jasa Konunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD Balangan	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	125,795,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD Balangan	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	1 Paket	100,186,660	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD Balangan	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	1 Paket	100,186,660	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD Balangan	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang mendapat pemeliharaan rutin atau berkala dan perijinan kendaraan dinas atau operasional	12 Bulan	298,628,488	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD Balangan	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang mendapat pemeliharaan rutin atau berkala dan perijinan kendaraan dinas atau operasional	12 Bulan	298,628,488	

Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	BPBD Balangan	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	16,000,000	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	BPBD Balangan	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	16,000,000	
Pemeriharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD Balangan	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin atau berkala		168,680,000	Pemeriharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD Balangan	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin atau berkala		218,180,000	
Pemeriharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD Balangan	Waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	139,970,800	Pemeriharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD Balangan	Waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	110,930,800	
Program Penanggulangan Bencana					Program Penanggulangan Bencana					
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten /Kota	BPBD Balangan	Jumlah wilayah berpotensi bencana yang terpantau	60 Desa	109,430,000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten /Kota	BPBD Balangan	Jumlah wilayah berpotensi bencana yang terpantau	60 Desa	192,190,000	
Sosialisai,Komunikasi ,Informasi,Edukasi (KIE) Rawan Bencana	BPBD Balangan	Jumlah Wilayah Berpotensi Bencana yang Mendapatkan Informasi tentang rawan bencana	60 Desa	744,940,000	Sosialisai,Komunikasi ,Informasi,Edukasi (KIE) Rawan Bencana	BPBD Balangan	Jumlah Wilayah Berpotensi Bencana yang Mendapatkan Informasi tentang rawan bencana	60 Desa	121,705,800	
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD Balangan	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Paket	1,456,864,250	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD Balangan	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Paket	145,098,200	

Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	Jumlah Dokumen Bencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	1 Dokumen	62,713,200	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	Jumlah Dokumen Bencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	1 Dokumen	89,999,800	
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%	523,385,400	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%	523,385,400	
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	2 Kegiatan	1,248,046,600	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	2 Kegiatan	1,688,069,400	
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD Balangan	jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	147,204,600	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD Balangan	jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	413,980,300	
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
Respon Cepat darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	91,100,000	Respon Cepat darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	91,100,000	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	Jumlah Bantuan logistik yang tersalurkan kepada korban bencana	60 Paket	509,800,000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	Jumlah Bantuan logistik yang tersalurkan kepada korban bencana	60 Paket	499,800,000	

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	Jumlah Bencana Kebakaran yang Tertangani	15 Kegiatan	1,000,121,300	Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	Jumlah Bencana Kebakaran yang Tertangani	15 Kegiatan	1,000,121,300	
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	BPBD Balangan	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan dan pelatihan tentang penanganan bencana kebakaran	200 Orang	113,443,300	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	BPBD Balangan	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan dan pelatihan tentang penanganan bencana kebakaran	200 Orang	129,937,900	

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM dan KEGIATAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Balangan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Mekanisme perencanaan pembangunan telah dirancang agar dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dalam proses penyusunan rencana pembangunan telah ditempuh melalui beberapa mekanisme usulan, yaitu kegiatan musrenbang, aspirasi langsung kepada Kepala Pelaksana saat kunjungan ke lapangan, aspirasi melalui hasil Reses DPRD, dll.

Usulan Program dan Kegiatan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : ... BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD BALANGAN	jumlah gedung kantor yang diadakan	1 Unit	Reses DPRD
Program Penanggulangan Bencana					
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD BALANGAN	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Perahu Fiber 3 Unit, Perahu kayu 8 Unit, mesin alkon 4 Buah, dan 54 Buah Life Jacket	Reses DPRD

Seiring dengan keterbukaan informasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Balangan membuka beberapa sarana untuk membangun sinergi dan komunikasi pembangunan dengan masyarakat. Kanal yang dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Balangan antara lain melalui media social (facebook, instagram, dll). Meskipun terhubung secara struktur, BPBD Kab. Balangan juga mempunyai kanal tersendiri melalui berbagai media yang dimanfaatkan untuk jalur komunikasi dua arah sehingga penanganan bencana di Kabupaten Balangan dapat berjalan dengan efektif, efisien, cepat, tanggap.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peluang daerah untuk mengelola pembangunannya secara mandiri semakin terbuka lebar. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan azas desentralisasi mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut, implementasinya perlu dilakukan dengan terencana dan terarah serta mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, keselarasan dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan tentunya sangat diperlukan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan perencanaan pembangunan pemerintah kabupaten Balangan dan nasional, sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah. Keterkaitan dan keselarasan dalam hal perencanaan program bidang perhubungan terhadap kebijakan nasional dapat dilihat dari keselarasan antara Renstra Badan Penanggulangan Nasional Penanggulangan Bencana Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.

Dalam Rencana Strategisnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki visi, yaitu : *“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”*. Misi yang dijalankan untuk mencapai Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana.
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh BNPB selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana.
2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Dengan melihat Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana, adanya penekanan yang berkaitan dengan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya

penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (stakeholders). Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan

kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat.

Kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dituangkan dalam renstra dan memberikan pengaruh terhadap BPBD Kabupaten Balangan adalah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergitas penanggulangan bencana. Koordinasi penanggulangan bencana berkaitan dengan permasalahan koordinasi yang melibatkan Kabupaten lain terutama yang secara geografis posisinya berbatasan dengan Kabupaten Balangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sejalan dengan Visi pembangunan Kabupaten Balangan sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Balangan “MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA, MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”, tujuan yang akan dicapai BPBD Kab. Balangan adalah

Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target	
				2022	2026
1	Meningkatnya Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	139,89	139,89

BAB IV

RENCANA KERJA, PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DAN ANALISIS DAMPAK SOSIAL

4.1 RENCANA KERJA, PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tentunya dilakukan dengan menetapkan langkah-langkah strategis, untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan perlu menetapkan strategi dan kebijakan agar pelaksanaan program dan kegiatan menjadi terarah dan terpadu.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati. Adapun Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan juga akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Strategi dan Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Balangan**

Nama Perangkat Daerah : BPBD													
Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
1													
1	05	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	BPBD Balangan	2 Dokumen	21.339.600	APBD		2 Dokumen	23.000.000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPBD Balangan	2 Dokumen	6.000.000	APBD		2 Dokumen	7.000.000
1	05	01	2.01	06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD Balangan	5 Dokumen	118.480.000	APBD		5 Dokumen	130.000.000
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Balangan	14 Bulan	4,418,570,155	APBD		14 Bulan	4.700.000.000

1	05	01	2.02	05	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPBD Balangan	2 Dokumen	10,000,000	APBD		2 Dokumen	11.000.000
1	05	01	2.02	07	Kordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD Balangan	1 Dokumen	46,800,000	APBD		1 Dokumen	51.000.000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepagawain Perangkat Daerah								
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	BPBD Balangan	46 Stel	45,000,000	APBD		46 Stel	50.000.000
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPBD Balangan	20 Orang	272,378,000	APBD		20 Orang	300.000.000
1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang diadakan	BPBD Balangan	12 Bulan	13,275,100	APBD		12 Bulan	17.000.000
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	BPBD Balangan	5 Buah	222,978,900	APBD		5 Buah	245.000.000

1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	BPBD Balangan	12 Bulan	44,045,300	APBD		12 Bulan	49.000.000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	BPBD Balangan	12 Bulan	11,995,200	APBD		12 Bulan	14.000.000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat dan Kordinasi Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BPBD Balangan	90 Kali	194,508,600	APBD		90 Kali	114.000.000
Kegiatan Penguasaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang diadakan	BPBD Balangan	4 unit		APBD		12 Unit	360.000.000
					Pengandaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	BPBD Balangan	-	424,845,300	APBD		-	465.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat	BPBD Balangan	12 Bulan	193,383,600	APBD		12 Bulan	213.000.000
					Penyediaan Jasa Konunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD Balangan	12 Bulan	125,795,000	APBD		12 Bulan	137.000.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	BPBD Balangan	1 Paket	100,186,660	APBD		1 Paket	110.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang mendapat pemeliharaan rutin atau berkala dan perijinan kendaraan dinas atau operasional	BPBD Balangan	12 Bulan	298,628,488	APBD		12 Bulan	318.000.000
					Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BPBD Balangan	12 Bulan	16,000,000	APBD		12 Bulan	17.600.000
					Pemeriharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin atau berkala	BPBD Balangan	1 Unit	168,680,000	APBD		1 Unit	184.000.000
					Pemeriharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPBD Balangan	12 Bulan	139,970,800	APBD		12 Bulan	152.000.000
1	05	03			Program Penanggulangan Bencana								
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah wilayah berpotensi bencana yang terpantau	BPBD Balangan	60 Desa	109,450,000	APBD		80 Desa	120.000.000
1	05	03	2.01	02	Sosialisai,Komunikasi,Info rmasi,Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah Wilayah Berpotensi Bencana yang Mendapatkan Informasi tentang rawan bencana	BPBD Balangan	60 Desa	744,940,000	APBD		80 Desa	814.000.000
					Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								

				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD Balangan	1 Paket	1,456,804,250	APBD		1 Paket	1.556.000.000
				Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	BPBD Balangan	1 Dokumen	62,713,200	APBD		1 Dokumen	70.000.000
				Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	BPBD Balangan	100%	523,585,400	APBD		100%	576.000.000
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Anggota TRC	BPBD Balangan	2 Kegiatan	1,248,046,000	APBD		2 Kegiatan	1.370.000.000
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	BPBD Balangan	100 Orang	147,204,600	APBD		100 Orang	168.000.000
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana												
				Respon Cepat darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	BPBD Balangan	1 Dokumen	91,100,000	APBD		1 Dokumen	100.000.000

				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan logistik yang tersalurkan kepada korban bencana	BPBD Balangan	60 Paket	509,800,000	APBD		70 Paket	560.000.000
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran												
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota												
				Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Kebakaran yang Tertangani	BPBD Balangan	15 Kegiatan	1,000,121,300	APBD		10 Kegiatan	1.110.000.000
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran												
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan dan pelatihan tentang penanganan bencana kebakaran	BPBD Balangan	200 Orang	113,443,500	APBD		200 Orang	125.000.000



Analisis Dampak Sosial

Dalam dokumen RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki Visi “ Mewujudkan Kabupaten Balangan yang Aman dan Nyaman Melalui Pencegahan dan Penanganan Bencana yang Tanggap, Cepat dan Tepat” dan untuk mewujudkan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki satu Program Utama Yaitu “**Program Penanggulangan Bencana Daerah**”

Penanggulangan dan mitigasi bencana merupakan suatu yang mutlak dan menjadi prioritas primer bagi setiap Negara, Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir beberapa Kabupaten/Kota di Wilayah NKRI banyak yang terkena Bencana Alam seperti Banjir, Tanah Longsor, Karhutla dan lain sebagainya, tentu saja hal ini banyak menimbulkan dampak yang mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat yang terkena bencana tersebut.

Dengan demikian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mempunyai peran yang sangat penting dalam mengurangi dampak tersebut, berdasarkan hal tersebut maka BPBD melakukan upaya untuk Pengurangan Resiko Bencana (PRB), PRB harus di sosialisasikan kepada masyarakat. PRB sudah diperkuat dengan dikeluarkan undang-undang tentang penanggulangan Bencana. Oleh karena itu keberhasilan pemulihan ekonomi masyarakat dapat ditunjang dengan adanya program Penanggulangan Bencana baik itu faktor Alam ataupun Faktor Non Alam.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menuangkan langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Rencana Kerja yang merupakan suatu proses yang mengarahkan para pemimpin Dinas beserta jajarannya dalam merealisasikan Visi dan Misi Bupati yang merupakan acuan dasar untuk pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan kebijakan pada tahun yang ditetapkan. Dengan demikian, Rencana Kerja bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan rencana di atasnya (Renstra PD, RKPD dan RPJMD Kabupaten Balangan) serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Sesuai dengan Realistis Kebutuhan Anggaran untuk pencapaian program-program yang ditetapkan yang dituangkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yaitu untuk pemenuhan unsur kegiatan Rutin (administrasi dan operasional rutin), Kegiatan Operasional (Pemeliharaan dan Rehabilitasi) dan kegiatan untuk Investasi (pemenuhan Sarana dan Prasarana), Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana (sosialisasi), Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan (penyusunan rencana penanggulangan

bencana, pelatihan, dan pengendalian bencana), Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban (penyediaan logistik, respon cepat, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban dan aktivasi system komando), Kegiatan penataan sistem dasar pananggulangan bencana (pengelolaan dan pemanfaatan system peananggulangan bencana).

